



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 37/KMA/SK/II/2017

TENTANG

PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN
AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU
PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada dua puluh sembilan Pengadilan Agama kelas II menjadi Pengadilan Agama kelas I B dan dua puluh satu Pengadilan Agama kelas I B menjadi Pengadilan Agama kelas I A;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A.

PERTAMA : Meningkatkan kelas Pengadilan Agama Sambas, Sungguminasa, Mempawah, Polewali, Kayu Agung, Dumai, Limboto, Rantau Prapat, Wates, Kisaran, Muara Enim, Rengat, Gunung Sugih, Payakumbuh, Pangkalan Bun, Pelaihari, Donggala, Pare Pare, Tanjung Pandan, Dompu, Martapura, Tanggamus,

Bangko, Luwuk, Sengeti, Kalianda, Muara Bulian, Kotamobagu dan Maros dari kelas II menjadi kelas I B.

KEDUA : Meningkatkan kelas Pengadilan Agama Tigaraksa, Metro, Serang, Bekasi, Sleman, Sragen, Purwokerto, Depok, Surakarta, Batam, Gorontalo, Sidoarjo, Tangerang, Kabupaten Malang, Bogor, Cibinong, Slawi, Watampone, Tanjung Pinang, Pati dan Kebumen dari kelas I B menjadi kelas I A.

KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagai tersebut diatas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KEEMPAT : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Pengadilan Agama di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Pengadilan Agama dengan rincian:

1. Pengadilan Agama kelas I A : 76.
2. Pengadilan Agama kelas I B : 106.
3. Pengadilan Agama kelas II : 157.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :37/KMA/SK/II/2017
 TANGGAL : 9 Februari 2017

DAFTAR PENGADILAN AGAMA YANG DITINGKATKAN KELASNYA
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
 PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

NO	PENGADILAN		KLS	KETERANGAN
	TINGGI AGAMA	AGAMA		
1	Makassar	Watampone	I A	Peningkatan kelas
		Sungguminasa	I B	
		Polewali	I B	
		Pare Pare	I B	
		Maros	I B	
2	Banten	Tigaraksa	I A	
		Serang	I A	
		Tangerang	I A	
3	Bandar Lampung	Metro	I A	
		Gunung Sugih	I B	
		Kalianda	I B	
		Tanggamus	I B	
4	Manado	Kotamobagu	I B	
5	Semarang	Sragen	I A	
		Purwokerto	I A	
		Kebumen	I A	
		Surakarta	I A	
		Slawi	I A	
Pati	I A			
6	Mataram	Dompu	I B	
7	Bandung	Bekasi	I A	
		Bogor	I A	
		Depok	I A	
		Cibinong	I A	
8	Bangka Belitung	Tanjung Pandan	I B	
9	Pekan Baru	Batam	I A	
		Tanjung Pinang	I A	
		Dumai	I B	
		Rengat	I B	
10	Pontianak	Sambas	I B	
		Mempawah	I B	
11	Medan	Rantau Prapat	I B	
		Kisaran	I B	
12	Jambi	Bangko	I B	
		Sengeti	I B	
		Muara Bulian	I B	

NO	PENGADILAN		KLS	KETERANGAN
	TINGGI AGAMA	AGAMA		
13	Palembang	Kayu Agung Muara Enim	I B I B	
14	Surabaya	Sidoarjo Kabupaten Malang	I A I A	
15	Gorontalo	Gorontalo Limboto	I A I B	
16	Padang	Payakumbuh	I B	
17	Palu	Donggala Luwuk	I B I B	
18	Banjarmasin	Pelaihari Martapura	I B I B	
19	Palangkaraya	Pangkalan Bun	I B	
20	Yogyakarta	Sleman Wates	I A I B	

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 9 Februari 2017

REKAPITULASI ESELONISASI PADA PENINGKATAN KELAS
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
1	Pengadilan Agama Tigaraksa kelas I A	-	1	-	3	-	-
2	Pengadilan Agama Metro kelas I A	-	1	-	3	-	-
3	Pengadilan Agama Serang kelas I A	-	1	-	3	-	-
4	Pengadilan Agama Bekasi kelas I A	-	1	-	3	-	-
5	Pengadilan Agama Sleman kelas I A	-	1	-	3	-	-
6	Pengadilan Agama Sragen kelas I A	-	1	-	3	-	-
7	Pengadilan Agama Purwokerto kelas I A	-	1	-	3	-	-
8	Pengadilan Agama Depok kelas I A	-	1	-	3	-	-
9	Pengadilan Agama Surakarta kelas I A	-	1	-	3	-	-
10	Pengadilan Agama Batam kelas I A	-	1	-	3	-	-
11	Pengadilan Agama Gorontalo kelas I A	-	1	-	3	-	-
12	Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I A	-	1	-	3	-	-
13	Pengadilan Agama Tangerang kelas I A	-	1	-	3	-	-
14	Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas I A	-	1	-	3	-	-

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
15	Pengadilan Agama Bogor kelas I A	-	1	-	3	-	-
16	Pengadilan Agama Cibinong kelas I A	-	1	-	3	-	-
17	Pengadilan Agama Slawi kelas I A	-	1	-	3	-	-
18	Pengadilan Agama Watampone kelas I A	-	1	-	3	-	-
19	Pengadilan Agama Tanjung Pinang kelas I A	-	1	-	3	-	-
20	Pengadilan Agama Pati kelas I A	-	1	-	3	-	-
21	Pengadilan Agama Kebumen kelas I A	-	1	-	3	-	-
22	Pengadilan Agama Sambas kelas I B	-	-	1	3	-	-
23	Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B	-	-	1	3	-	-
24	Pengadilan Agama Mempawah kelas I B	-	-	1	3	-	-
25	Pengadilan Agama Polewali kelas I B	-	-	1	3	-	-
26	Pengadilan Agama Kayu Agung kelas I B	-	-	1	3	-	-
27	Pengadilan Agama Dumai kelas I B	-	-	1	3	-	-
28	Pengadilan Agama Limboto kelas I B	-	-	1	3	-	-
29	Pengadilan Agama Rantau Prapat kelas I B	-	-	1	3	-	-
30	Pengadilan Agama Wates kelas I B	-	-	1	3	-	-
31	Pengadilan Agama Kisaran kelas I B	-	-	1	3	-	-
32	Pengadilan Agama Muara Enim kelas I B	-	-	1	3	-	-
33	Pengadilan Agama Rengat kelas I B	-	-	1	3	-	-

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
34	Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas I B	-	-	1	3	-	-
35	Pengadilan Agama Payakumbuh kelas I B	-	-	1	3	-	-
36	Pengadilan Agama Pangkalan Bun kelas I B	-	-	1	3	-	-
37	Pengadilan Agama Pelaihari kelas I B	-	-	1	3	-	-
38	Pengadilan Agama Donggala kelas I B	-	-	1	3	-	-
39	Pengadilan Agama Pare Pare kelas I B	-	-	1	3	-	-
40	Pengadilan Agama Tanjung Pandan kelas I B	-	-	1	3	-	-
41	Pengadilan Agama Dompus kelas I B	-	-	1	3	-	-
42	Pengadilan Agama Martapura kelas I B	-	-	1	3	-	-
43	Pengadilan Agama Tanggamus kelas I B	-	-	1	3	-	-
44	Pengadilan Agama Bangko kelas I B	-	-	1	3	-	-
45	Pengadilan Agama Luwuk kelas I B	-	-	1	3	-	-
46	Pengadilan Agama Sengeti kelas I B	-	-	1	3	-	-
47	Pengadilan Agama Kalianda kelas I B	-	-	1	3	-	-
48	Pengadilan Agama Muara Bulian kelas I B	-	-	1	3	-	-

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
49	Pengadilan Agama Kotamobagu kelas I B	-	-	1	3	-	-
50	Pengadilan Agama Maros kelas I B	-	-	1	3	-	-
	J U M L A H	-	21	29	150	-	-

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI